

KORUPSI dan GELAPNYA NEGATIFITAS^{*1}

Donny Danardono^{**1}

Korupsi, dalam bahasa Indonesia, lebih sering dipahami sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri. Sedangkan dalam bahasa Inggris, korupsi juga dipahami sebagai pikiran dan perilaku yang menyimpang atau jahat. Dalam bahasa Inggris ada istilah *corrupted mind*.

Mungkin bahasa Indonesia, sebagai bahasa yang relatif baru, tak memiliki istilah yang tepat untuk mengungkap “penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri” ini. Ia begitu saja menyerap kosa kata Inggris: “*corruption*”. Sebaliknya bahasa Indonesia telah memiliki berbagai ungkapan yang tepat untuk menjelaskan berbagai bentuk *corrupted mind*, seperti “tak jujur”, “tak punya jati-diri”, atau “rusak”.

Sempitnya makna korupsi dalam bahasa Indonesia, bisa jadi, akan mempersulit kebanyakan orang Indonesia untuk melihat kaitan antara korupsi (penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri) dengan beragam negatifitas perilaku dan bagaimana mengatasinya.

Korupsi dan Gelapnya Negatifitas

Pada tahun 2018 B. Herry Priyono menerbitkan buku *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta). Buku setebal 664 halaman ini secara sistematis dan masif melacak sejarah gagasan—baik itu gagasan-gagasan dalam filsafat moral maupun berbagai ilmu sosial—tentang korupsi sejak periode klasik sampai modern. Buku ini tentu bisa menjadi pegangan saat memahami sejauh mana peluang untuk tuntas memberantas korupsi

Di Bab 6 buku ini (bab yang saya gunakan untuk menulis makalah ini) Herry Priyono tidak secara jelas menggunakan istilah era klasik (Romawi dan Yunani Kuno), abad pertengahan, *renaissance*, dan modern, namun ia membahas para filsuf, teolog dan ilmuwan itu secara urut berdasarkan periodisasi sejarah kebudayaan Eropa.

Di era Yunani Kuno ia menuliskan pendapat Aristoteles tentang korupsi sebagai tindakan yang tak rasional. Aristoteles, seperti halnya Sokrates dan Plato, menganggap manusia adalah binatang yang memiliki rasio. Bagi mereka rasio adalah “... *locus* realitas, kebenaran, dan kebaikan tertinggi”.¹ Sejak itu laku manusia dipilah menjadi rasional dan emosional. Korupsi adalah laku yang emosional, karena koruptor lebih mengikuti emosinya dan mengabaikan rasionya saat mengambil yang bukan haknya.

^{*1} Disampaikan dalam webinar dan diskursus tentang Korupsi yang diadakan oleh “Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada Senin, 1 Maret 2021, di <https://zoom.us/j/94394238251?pwd=cFRHQnZ1b0hsWGtyOTY1NTBjVW1oUT09>

^{**1} Donny Danardono adalah dosen di Fakultas Hukum & Komunikasi dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan, Universitas Katolik Soegijapranata.

¹ B. Herry Priyono, 2018, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 335.

Masifnya korupsi akan merusak tatanan masyarakat yang rasional. Herry Priyono juga mengungkap perbedaan Plato dari Aristoteles dalam memahami rasionalitas dan ketidakrasionalan manusia. Bagi Plato rasionalitas adalah hal yang secara filosofis menyerupai geometri dan matematika. Karena itu tatanan sosial dan politik yang tidak rasional harus diubah oleh filsafat dan filsuf. Sementara Aristoteles lebih membumi dalam melihat tatanan sosial dan politik. Kekacauan sosial dan politik harus diubah secara politik. Jadi bila Plato akan merevolusi tatanan sosial-politik yang kacau dengan filsafat, Aristoteles akan menyelamatkan politik dari filsafat saat mengubah tatanan sosial-politik yang kacau itu.²

Di abad pertengahan Eropa yang teokratis, Santo Agustinus menteologikan korupsi. Ia mengunggah korupsi ke tataran transenden. Karena itu baginya korupsi adalah "... kebalikan dari apa yang ideal, murni dan utuh".³ Tentang hal itu Herry Priyono menulis:

Dalam teologi, korupsi dipakai untuk mengungkapkan ciri mortal manusia (bisa mati, cacat) di hadapan **keabadian** dan tidak membusuknya Tuhan (*incorruptus*). Dari arti dasar itu terbentuklah beragam oposisi pararel: hidup-mati, murni-busuk, utuh-remuk, tatanan-kekacauan, legitim-ilegitim, tidak korup-korup. Oposisi ini menandai bukan hanya paham religius tetapi juga paham non-religius. Dengan melacak arti korupsi dalam hukum, ahli hukum Laura Underkuffler menyimpulkan, bahwa paham hukum tentang korupsi sepenuhnya bersandar pada "gagasan religius kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesesatan".⁴

Sementara Machiavelli, filsuf politik era Renasissance, lebih condong ke Aristoteles saat mau mengubah tatanan sosial-politik yang kacau. Ia akan melihat dinamika sosial dari konsep baik (moral) dan tidak seperti Plato yang membakukan konsep baik (moral) tertentu.⁵ Tentu kita ingat buku karya Machiavelli, yaitu *Il Principe* yang berisi nasihat untuk para pangeran dan bangsawan agar tak ragu menggunakan beragam cara untuk mencapai tujuan (menyatukan negara yang terpecah). Bagi Machiavelli konsep kebaikan selalu dalam proses. Tentang hal ini Herry Priyono menyatakan: "*Dalam banyak hal Machiavelli lebih dekat dengan Aristoteles daripada Plato, yaitu mengejar apa 'yang baik' dari dalam dinamika peristiwa ketimbang dengan menetakannya dari keabadian presisi geometri dan matematika*".⁶ Jadi Machiavelli, seperti kebanyakan pemikir Renaissance, lebih mempersoalkan moralitas daripada rasionalitas.

Namun di era modern (akhir abad 17) terjadi upaya untuk mengembalikan dan meradikalkan rasio demi menata ruang publik. Saat itu muncul anggapan, bahwa kehidupan politik akan baik bila tertata secara rasional. Karena itu para pemikir modern menganggap korupsi sebagai laku yang tak bisa dipahami secara rasional:

² *Ibid.*, hal. 335.

³ *Ibid.*, hal. 333.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 336.

⁶ *Ibid.*

Apa yang ditunjuk dengan istilah korupsi merupakan bagian rumpun gejala dan perbuatan yang tidak terjelaskan dalam bangunan sistem rasionalitas pengetahuan dan moral. Dalam ungkapan sejarawan Woodruff Smith, korupsi “menempati suatu wilayah yang terletak di luar teori”, suatu “ruang empiris, persis karena pengetahuan mengenai yang korup hanya diperoleh melalui pengalaman”, bukan melalui logika konsistensi nalar.⁷

Tinjauan sejarah gagasan tentang korupsi ini menunjukkan, bahwa korupsi dekat dengan berbagai bentuk negatifitas. Di dalam korupsi ada unsur-unsur kematian (teologis), ketidakmoralan, dan ketidakrasionalan. Namun, menurut Herry Priyono, karena modernitas menggugurkan rasionalitas, maka modernitas lebih menganggap korupsi sebagai perilaku emosional (nafsu) yang tak terpahami oleh rasio. Begitulah, menurutnya, istilah korupsi kemudian dengan sendirinya di-eksternal-kan dan secara konseptual dikarantina menurut kriteria moral.⁸ Korupsi begitu saja dianggap sebagai laku yang absurd dan karena itu “... apa yang disebut sebagai ‘problem kejahatan’ (*the problem of evil*) tetap menjadi teka-teki abadi”.⁹ Korupsi adalah perbuatan yang tak bisa dipahami secara rasional. Ia gelap.

Sulitnya Memberantas Korupsi

Di Indonesia korupsi dipahami sebagai “perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Definisi itu berasal dari UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah digantikan oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun di UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Koruptor menurut ketiga UU itu adalah pegawai birokrasi atau siapa saja yang menyuap pegawai birokrasi demi memperoleh keuntungan dari jabatan birokrasi itu (Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999). Sementara yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah “seluruh kekayaan negara baik yang dipisahkan atau pun tidak” (bagian Umum Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999). Dan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun **usaha masyarakat secara mandiri** yang didasarkan pada **kebijakan Pemerintah**” (bagian Umum Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999).

Dari ketiga UU itu dapat diketahui, bahwa unsur-unsur korupsi adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri-orang lain-korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur korupsi dalam ketiga UU Pemberantasan Korupsi ini juga ada dalam berbagai definisi korupsi yang

⁷ *Ibid.*, hal. 338.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

sepintas lalu saya uraikan di atas sebagai berbagai bentuk negatifitas (kematian, ketidakmoralan, dan ketidakrasionalan).

Cara mendefinisikan negatifitas ini tidak akan bisa secara tepat mengungkap makna kata yang didefinisikan itu. Karena itu pada tahun 2007 saya menulis artikel untuk menunjukkan ketidakpuasan saya terhadap istilah “mafia peradilan”.¹⁰ Saat itu para pejuang anti mafia pradilan hanya mengidentikkan mafia peradilan dengan para penegak hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri saat menangani kasus hukum. Jadi mereka mengidentikkan mafia peradilan dengan korupsi uang. Padahal sampai dengan tahun 2007 itu mafia peradilan juga terjadi dalam bentuk diskriminasi ideologi (pengadilan terhadap orang-orang PKI), atau perlindungan jabatan (pengadilan kasus pembunuhan Marsinah dan Munir). Bisa jadi mafia peradilan bermotif ideologis dan perlindungan jabatan ini berlangsung tanpa usaha memperkaya diri. Jadi saya mengusulkan agar definisi mafia peradilan diperluas. Pada tahun 2009 presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan istilah yang lebih tepat, yaitu mafia hukum.¹¹ Tapi tentu saja munculnya istilah mafia hukum ini bukan karena kritik saya terhadap konsep mafia peradilan pada tahun 2007 itu. Tapi sejak itu tak ada lagi yang menggunakan istilah mafia peradilan.

Lebih dari itu cara filsafat moral dan ilmu-ilmu sosial dalam mendefinisikan korupsi (dan kejahatan lainnya) dengan menunjukkan sifat negatif dari korupsi (dan kejahatan) akan membuat norma hukum tidak bisa begitu saja mengatur dan menjatuhkan sanksi terhadap korupsi. Hukum, seperti ketiga UU tentang Pemberantasan Korupsi itu, hanya berfungsi bila terlebih dulu menetapkan unsur-unsur perbuatan agar secara normatif dan praktis bisa mengatur dan menjatuhkan sanksi terhadapnya. Namun penetapan unsur-unsur itu tidak dengan sendirinya bisa menjangkau keluasan definisi tentang korupsi atau kejahatan pada umumnya. Tentang hal ini Herry Priyono menulis:

Keluasan cakupan arti korupsi ni begitu rupa, hingga bagai menjaring angin, peneliti akan kesulitan menangkap jenis tindakan dan gejala yang disebut korupsi. Jika menerima suap itu korup, membeli suara dalam pemilihan juga korup, pengejaran kemewahan dengan mengabaikan solidaritas publik korup pula, maka dapat dikatakan bahwa korupsi lebih menunjuk *ciri* perbuatan atau gejala ketimbang *perbuatan*. Inilah kesimpulan ahli hukum Laura Underkuffler: “Korupsi menunjuk pada ciri (*character*), bukan perbuatan (*act*)”. Karena hukum hanya menangani perbuatan dan bukan watak/ciri, luasnya arti konsep “korupsi tidak dapat diwadahi (dalam, DD) paham konvensional hukum”. Inilah masalah konseptual yang kita warisi dari keluasan arti korupsi dalam tradisi klasik.¹²

¹⁰ Donny Danardono, 2007, “Uang, Ideologi dan Jabatan dalam Mafia Peradilan: Reduksi terhadap The Political”, *Renai*, tahun VII, No. 2.

¹¹ “SBY Bentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum”, *news.detik.com*, 23 November 2009; diunduh pada 28 Februari 2021.

¹² B. Herry Priyono, 2018, *op.cit.*, hal. 339.

Saya kira kesulitan hukum untuk secara tuntas mengatur dan menjatuhkan sanksi terhadap korupsi adalah karena hukum tetap membutuhkan bantuan filsafat moral dan ilmu-ilmu sosial untuk mendefinisikan korupsi. Padahal seperti yang saya uraikan di atas, cara filsafat moral dan ilmu-ilmu sosial dalam mendefinisikan korupsi (dan kejahatan) adalah dengan hanya menunjuk sifat negatif dari perbuatan itu dan bukan dengan memahami perbuatan yang dianggap negatif itu. Akibatnya secara konseptual korupsi dan kejahatan tetap gelap. Bahkan korupsi dan berbagai bentuk kejahatan akan terus berubah bentuk seperti kata ungkapan: “penjahat lebih canggih daripada polisi”.